

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya*. Jakarta. Sinar Grafika. 2007.
- Anisah, Siti. *Pemberian Mut'ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat*. Magelang. Universitas Muhammadiyah Magelang. 2019.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*. Semarang. Pustaka Rizki Putra. 1997.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 1999.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Terj. Abdul Majid Khon. Jakarta. Amzah. 2017.
- Bahrudin, A. Implementasi *Maqashid Syari'ah* sebagai Solusi Problematika Sosial dan Kemasyarakatan Kontemporer. *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*. Volume 17 No. 1 Juni 2017.
- Basyarahil, Abdul Aziz Salim. *Tuntutan Pernikahan dan Perkawinan*. Jakarta. Gema Insani. 2005.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta. UII Press. 1999.
- Cahyadi, Irwan Adi. *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif di Indonesia*. Malang. Universitas Brawijaya. 2014.
- Diantha, Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta. Kencana. 2016.
- Dodi, Limas. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta. Pustaka Ilmu. 2015.

- Haidar, Ali Masykuri. *Cuplikan Rumusan Hukum Kamar Agama Mahkamah Agung RI (Bagian Kedua)*. Palangka Raya. 2020.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta. Sinar Grafika. 2009.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta. Logos Wacana Ilmu. 1997.
- Hasanah, Sovia. *Jika Tidak Hadir Pada Sidang Perceraian*. Diakses melalui <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cf553564138f/jika-tidak-hadir-pada-sidang-perceraian/> pada tanggal 13 Januari 2021 pukul 10:39 WIB.
- Hatta, Ahmad. *Tafsir Qur'an Per Kata Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul & Terjemah*. Jakarta. Magfirah Pustaka. 2009.
- Heniyatun, dkk. Pemberian Mut'ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat. *PROFETIKA, Jurnal Studi Islam*. Vol. 21, No. 1. Special Issue 2020: 39-59.
- Hermawan, Iwan. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed Methode*. Karawang. Hidayatul Quran Kuningan. 2019.
- Iqbal, Muhammad. *Psikologi Pernikahan Menyelami Rahasia Pernikahan*. Jakarta. Gema Insani. 2018.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Bandung. RISALAH. 1985.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) & RIB/HIR Dilengkapi: Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Perkawinan Dengan Penjelasannya*. Penerbit Pustaka Anak Bangsa. 2015.
- Kompilasi Hukum Islam*. Buku I Hukum Perkawinan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Tugas Pokok dan Fungsi*. Diakses melalui <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi> pada tanggal 02 Mei 2021 pukul 11:09 WIB.

Maimun dan Mohammad Thoha. *Perceraian dalam Bingkai Relasi Suami-Istri*. Pamekasan. Duta Media. 2018.

Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta. Kencana. 2016.

Misran. AL-MASHLAHAH MURSALAH (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer). *Pusat Jurnal UIN Ar-Raniry*. 2020.

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Madzhab*. Jakarta. Lentera. 2005.

Muhadi, Endra. *Aspek-Aspek Maqasid Asy-Syari'ah dalam Penetapan Alasan-Alasan Perceraian Pada PP No 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta. Stiletto Indie Book. 2019.

Naofal, Erlan, dkk, *Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama 2012 s/d 2019*. Riau. Pengadilan Agama Teluk Kuantan. 2020.

Nuraziimah, Masayu Fatiyyah. *Analisis Putusan Pengadilan Agama Magelang Tentang Pembebanan Nafkah Mut'ah Dan Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Perkara Nomor 0076/PDT.G/2017/PA.MGL)*. Yogyakarta. Universitas Islam Indonesia. 2020.

Nurhasan, Irfan. *Pandangan Hakim Terhadap Hak Nafkah Iddah Pada Kasus Cerai Gugat Karena KDRT (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Bekasi Tahun 2014)*. Jakarta. UIN Syarif Hidayatullah. 2016.

Pasaribu, Muksana. Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam. *Jurnal Justitia*. Vol. 1 No. 04 Desember 2014.

“Pengertian kata “kurang” Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring”. Diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kurang> pada tanggal 21 Desember 2021 pukul 09:15 WIB.

“Pengertian kata “sangat” Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring”. Diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sangat> pada tanggal 21 Desember 2021 pukul 09:00 WIB.

“Pengertian kata “tepat” Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring”. Diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tepat> pada tanggal 21 Desember 2021 pukul 09:12 WIB.

“Pengertian Kewajiban Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring”. Diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kewajiban> pada tanggal 05 September 2021 pukul 08:41 WIB.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam. *Ilmu Fiqih Jilid II*. Jakarta. Departemen Agama. 1983.

Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta. Bumi Aksara. 1999.

Satriani, Icha. *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung*. Makassar. Universitas Hasanuddin Makassar. 2015.

SA, Romli. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh: Metodologi Penetapan Hukum Islam*. Depok. Kencana. 2017.

Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta. Literasi Media Publishing. 2015.

- Sosroatmodjo, Arso dan H.A. Wasit Aulawi. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta. Bulan Bintang. 1978.
- Sosroatmodjo, Arso dan A. Wasit Aulawi. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta. Bulan Bintang. 2004.
- Subhan, Zaitunah. *Al-Qur'an & Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*. Jakarta. Prenadamedia Group. 2015.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta. Rineka Cipta dan Bina Adiaksara. 2005.
- Sumitro, Warkum. *Legislasi Hukum Islam Transformatif*. Malang. Setara Press. 2015.
- Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- Syukur, Sarmin. *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*. Surabaya. Jaudar Press. 2017.
- Tyas, Nova Sri Wahyuning. *Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Mengenai Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak*. 27 April 2020. Diakses melalui <https://www.pa-negara.go.id/artikel-kami/implementasi-perma-no-3-tahun-2017> pada tanggal 22 Desember 2021 pukul 05:11 WIB.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan-Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

“*Wajib Dibaca! 6 Tips Dasar Penelitian Hukum*”. Diakses melalui <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt57398fe1dc462/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum/#:~:text=Apa%20saja%20bahan%20hukum%20yang,penjelasan%20mengenai%20bahan%20hukum%20primer> pada tanggal 19 Februari 2021 pukul 06:09 WIB.

Widodo. *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*. Jakarta. Rajawali Pers. 2017.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia. 2008.

3 *Cara Mudah Mengambil Akta Cerai di Pengadilan*. Diakses melalui <https://www.alchosilber.com/2020/03/3-cara-mudah-untuk-mengambil-akta-cerai.html?m=1> pada tanggal 29 Agustus 2021 pukul 07:46 WIB.